

Judul : Tol Jakarta-Tangerang, Komisi III sebut truk ODOL biang macet
Tanggal : Senin, 16 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tol Jakarta-Tangerang Komisi III Sebut Truk ODOL Biang Macet

WAKIL Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mendesak Pemerintah dan institusi terkait mengambil langkah tegas dalam mengatasi kemacetan parah di ruas Tol Jakarta-Tangerang yang kian meresahkan. Hal ini terjadi karena maraknya truk yang mengambil lajur kanan dan praktik over dimension dan overloading (ODOL) yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menurut Rano, berdasarkan laporan masyarakat menunjukkan sejumlah truk kerap menggunakan lajur kanan. Hal itu memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk. Padahal jalur tersebut semestinya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului kendaraan lain.

"Ini sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jalur kanan bukan untuk kendaraan berat berjalan lambat," tegas Rano dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

Rano menyayangkan truk-truk dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai standar masih bebas beroperasi. Praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

Padahal, kata Rano, Pemerintah dan pihak terkait sudah lama berbicara soal penerbitan ODOL, tapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh setengah hati. "Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi nyata," tegas politikus PKB ini.

Rano menilai, sebagian pengemudi truk terkesan tidak gentar terhadap sistem tilang elektronik (ETLE), sehingga

tidak ada efek jera yang dirasakan. Karena itu, kepolisian harus mempertegas implementasi ETLE untuk memastikan sanksi benar-benar ditegakkan, dan melakukan evaluasi jika terdapat celah dalam sistem pengawasan.

"Kalau ETLE sudah diterapkan, maka pastikan penindakannya transparan dan tegas. Jangan sampai muncul persepsi pelanggaran bisa diabaikan tanpa konsekuensi," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Banten ini.

Rano mendorong adanya langkah preventif melalui rekayasa lalu lintas yang terukur, khususnya menjelang bulan Ramadan karena mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Caranya, pembatasan waktu operasional kendaraan berat pada jam tertentu, pengawasan intensif di titik-titik rawan, serta patroli rutin untuk memastikan truk tidak menggunakan lajur kanan.

"Koordinasi yang lebih solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pengelola jalan tol harus dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan," kata dia menekankan.

Rano berkeyakinan, jajaran Korlantas Polri bersama institusi terkait mampu bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Apalagi mereka memiliki kapasitas dan instrumen yang memadai untuk menertibkan pelanggaran ini. Sekarang tinggal bagaimana pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. "Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur," tandasnya ■ TIF